



# Buletin Parlementaria

Nomor 1077/I/XI/2019 • November 2019



## DPR Setujui Idham Azis Jabat Kapolri



9 772614 339005



4 Ketua DPR  
Harap Penguatan  
Hubungan Ekonomi  
Indonesia-Maroko



5 OKI Undang Pimpinan  
DPR Hadiri Acara  
Pemuda Islam Dunia



Komisi III DPR RI setuju Komjen Pol Idham Azis jabat Kapolri usai pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan. Foto: Ojle/HR

# DPR Setujui Idham Azis Jabat Kapolri

Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui Komjen Pol Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Persetujuan tersebut diperoleh usai Ketua DPR RI Puan Maharani menanyakan kepada seluruh Anggota Dewan, dan sebelumnya telah mendengar laporan dari Komisi III DPR RI mengenai proses uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap Idham Azis.

“Perkenankan saya menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi III DPR RI terhadap uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri tersebut dapat disetujui?”

tanya Puan kepada seluruh Anggota Dewan, yang seketika dijawab “Setuju”. Ketukan palu diiringi gemuruh tepuk tangan menjadi pertanda pengesahan.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery di hadapan Rapat Paripurna melaporkan, hasil Keputusan Rapat Pleno di Komisi III DPR RI bahwa seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyetujui untuk memberhentikan Jenderal Polisi Tito Karnavian dan mengangkat Idham Azis sebagai Kapolri. Diketahui, Tito ditugaskan Presiden Joko Widodo menjabat Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Indonesia Maju.

Herman menjelaskan bahwa Komisi III DPR RI sepenuhnya menyadari

dan memahami bahwa kecakapan, integritas, dan kompetensi Calon Kapolri merupakan prasyarat mutlak untuk menjadi Kapolri. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI berharap calon Kapolri terpilih nantinya sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Sehingga mampu meningkatkan citra dan wibawa lembaga Polri yang berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” papar Herman.

Dalam laporannya, Komisi III DPR RI juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Jenderal Polisi Tito Karnavian yang telah mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya secara profesional dalam melaksanakan tugasnya demi terciptanya keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Rangkaian uji kelayakan dan kepatutan kepada Idham dimulai dengan kunjungan seluruh jajaran Komisi III DPR RI yang terdiri dari sembilan fraksi ke kediaman pribadi Idham di Jalan Panglima Polim III Nomor 7A, Jakarta Selatan, Rabu (30/10). Setelah berdiskusi, memberikan pertanyaan, dan masukan, Komisi III DPR RI menyimpulkan keluarga Idham dinilai baik. Herman yang memimpin kunjungan ini mengatakan keluarganya patut dijadikan panutan oleh seluruh anggota institusi Kepolisian.

“Kesimpulan kami, keluarga Pak Idham Azis adalah keluarga *sakinah mawadah wa rahmah* yang patut dijadikan contoh oleh seluruh anggota institusi Polri. Kami berkesimpulan



**SEMUA FRAKSI BERKESIMPULAN BAHWA TIDAK PERLU MEMBUAT PANDANGAN FRAKSI, NAMUN KEPUTUSAN MELALUI KAPOKSI, YAITU AKLAMASI**

bahwa keluarga ini bisa menjadi panutan. Jika selesai nanti dipilih menjadi Kapolri, bapak dan ibu akan menjadi bapak ibu seluruh anggota Polri di seluruh Indonesia,” jelas Herman.

Menurut Herman, pertanyaan menyangkut keluarga dan pribadi semata-mata karena keluarga memberikan dukungan terhadap tugas-tugas sebagai Kapolri. “Mohon izin, mohon maaf, kenapa sampai kami masuk ke dalam kehidupan pribadi, karena ini sudah menjadi tradisi *fit and proper test* setiap calon Kapolri, dimana ada banyak hal-hal pribadi yang ingin kami tahu lebih jauh,” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu.

Di hadapan awak media, Herman pun mendoakan untuk kebaikan keluarga calon Kapolri. “Dan kami yakin mereka sanggup menjalankan tugas

dan amanah tersebut, kami simpulkan bahwa kami cukup puas dengan jawaban yang kami dapat tadi dengan melihat kehidupan keluarga. Kami berharap semoga Allah SWT selalu melindungi keluarga ini dan diizinkan oleh Allah untuk terpilih menjadi Kapolri nanti,” harap Herman.

Rangkaian uji kelayakan dan kepatutan dilanjutkan dengan mempertanyakan rencana program kerja prioritas untuk institusi Polri kepada Idham Azis di ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, usai kunjungan ke kediaman pribadi Idham Azis. Sejumlah Anggota Komisi III DPR RI dalam sesi pendalaman mempertanyakan program dan beberapa isu di Polri.

Setelah melakukan rapat pleno, Herman mengumumkan hasilnya, bahwa Komisi III DPR RI menyetujui Idham menjadi Kapolri, keputusan ini diambil secara aklamasi. “Semua Fraksi berkesimpulan bahwa tidak perlu membuat pandangan fraksi, namun keputusan melalui kapoksi, yaitu aklamasi. Aklamasi untuk menyetujui Komjen Idham Azis sebagai Kapolri,” papar Herman.

Sementara itu, sebelumnya Komjen Pol Idham Azis dalam uji kelayakan dan kepatutan membeberkan tujuh program prioritas untuk memajukan Polri. Program tersebut merupakan penguatan Polri promoter (profesional, modern dan tepercaya). “Menuju Indonesia maju, yang diimplementasikan dalam tujuh program prioritas,” kata mantan Kabareskrim Polri ini.

Tujuh program tersebut, pertama, mewujudkan SDM yang unggul. Kedua, pemantapan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (harkamtibnas). Ketiga, penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Keempat, pemantapan manajemen media. Kelima, penguatan sinergi polisi. Keenam, penataan kelembagaan, dan ketujuh penguatan pengawasan.

■ eko/es/sf



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI  
**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)  
**WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)  
**PIMPINAN PELAKSANA**  
Y.O.I Tahapari, S.H., M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)  
**W.K PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)  
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

**REDAKTUR**  
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi  
**REDAKTUR FOTO**  
Eka Hindra  
**SEKRETARIS REDAKSI**  
Guntur Dewanto, Hasri Mentari

**ANGGOTA REDAKSI**  
Rizka Arinindy, S.Sos., Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Annanda P. S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Purno Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

**FOTOGRAFER**  
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah  
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,  
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afduhillah,  
Gerald Opie.

**ANALIS MEDIA**  
Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya,  
Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati

**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,  
Dipa Natallio, Fajar Suryanto

**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

**PENERBITAN**  
**PIMPINAN PENERBITAN**  
Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**STAF PRODUKSI**  
Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito  
**PHOTOGRAFER ART**  
Friederick Munchen

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Sugiyanto, S.E., Yudi Kresna

**ADMINISTRASI**  
**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Arif, Lamin, Yuliana Puspita  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

# Ketua DPR Harap Penguatan Hubungan Ekonomi Indonesia-Maroko

**K**etua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita. Poin penting pembicaraan kedua belah pihak fokus pada hubungan bilateral serta kerja sama antara Indonesia dengan Maroko terutama di bidang ekonomi hingga anti-terorisme. Puan berharap, kerja sama bidang ekonomi dan investasi antara pemerintah Indonesia dengan Maroko dapat berjalan dengan baik. Sehingga, kerja sama kedua negara saling menguntungkan.

“Saya berharap hubungan ekonomi khususnya perdagangan dapat terus diperkuat. Untuk itu, saya dorong

kedua negara dapat memperluas akses pasar bagi produk unggulan masing-masing melalui *Preferential Trade Agreement* atau PTA,” papar Puan yang turut didampingi Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin dan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (28/10).

Kunjungan kerja Menteri Luar Negeri Maroko ini merupakan pertemuan bilateral pertama RI setelah Kabinet Indonesia Maju dibentuk. Maroko merupakan mitra penting bagi Indonesia terutama di wilayah Afrika Utara. Dan pada tahun 2020, akan menjadi peringatan hubungan diplomatik antara

kedua negara yang ke-60.

Indonesia telah menjalin kerja sama dengan Maroko sejak 60 tahun silam. Pertemuan Pimpinan DPR RI dengan Menlu Maroko ini dimaknai sebagai penyambutan hubungan kerja sama untuk masa depan. “Hubungan itu tentu saja akan kita terus tingkatkan dari tahun ke tahun. Selain eksekutif tentu saja kami legislatif akan mendukung kerja sama yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan,” ujar Puan.

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, hubungan persahabatan Indonesia dengan Maroko sebaiknya ditransformasikan menjadi hubungan yang bermanfaat bagi kedua negara. Puan juga mengharapkan kedua negara dapat meningkatkan kerja sama di berbagai macam industri yang memiliki potensi sangat besar.

Puan berharap pemerintah Maroko menyambut terbuka rencana beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan pengembangan usaha bidang infrastruktur, transportasi, dan perumahan di Maroko. “Saya berharap Pemerintah Maroko dapat mendukung rencana pengembangan usaha BUMN Indonesia di Maroko seperti PT. Wijaya Karya, PT. Timah dan PT. Pupuk Indonesia,” kata Puan.

Puan menjelaskan hubungan baik antara Indonesia dan Maroko sudah dimulai pada era Presiden Soekarno. Presiden pertama RI itu kerap mengunjungi negara yang berada di utara benua Afrika tersebut. “Tahun 1960 saat Presiden Soekarno sering datang dan bersahabat dengan Raja Maroko pada saat itu, jadi hubungan itu tentu saja akan kita terus tingkatkan,” tuturnya. ■ eko/es



Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita. Foto: Kresno/HR



Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menerima delegasi *Indonesia Islamic Young Leaders* atau OKI. Foto: Naefurojji/HR

# OKI Undang Pimpinan DPR Hadiri Acara Pemuda Islam Dunia



**SAYA JUGA MENITIPKAN PROGRAM CLIMATE CHANGE DAN DALAM RANGKA MENGANTISIPASI ERA GLOBALISASI DENGAN MENGEDEPANKAN DIGITALISASI**

**P**ara pemuda Islam yang tergabung dalam negara-negara Islam dunia (OKI) akan menggelar konferensi pada 23 November 2019 mendatang. Pimpinan DPR RI turut diundang untuk menjadi salah satu pembicara dalam konferensi teraebut.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menerima delegasi *Indonesia Islamic Young Leaders* di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10). Wakil Presiden Pemuda Islam Dunia Tata Taufiq Lubis yang memimpin delegasi telah meminta kesediaan Azis Syamsuddin menjadi pembicara dalam konferensi tersebut. Tema ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain jadi topik perbincangan para pemuda Islam dunia.

“OKI akan menggelar pertemuan pemuda Islam di dunia. Rencana akan diselenggarakan di Indonesia tanggal 23 November 2019. Kita meminta kerja sama teman-teman OKI untuk membangun bangsa dan negara baik dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan *Islamic finance*. Saya juga menitipkan program *climate change* dan dalam rangka mengantisipasi era globalisasi dengan mengedepankan digitalisasi,” ungkap Azis usai pertemuan.

Politisi Partai Golkar itu juga berharap, pertemuan para pemuda OKI di Indonesia selain membangun silaturahmi juga meningkatkan persaudaraan dengan membawa efek pada peningkatan kinerja ekonomi kerakyatan dan mampu bersaing

di tingkat internasional membawa harum nama bangsa dan negara. Sementara itu Tatan menjelaskan, acara konferensi ini selain menggelar seminar juga menggelar syariah *expo*.

Para pemuda Indonesia yang ikut konferensi ini berasal dari organisasi pemuda seperti HMI, PMII, IMM, Alwasliyah, dan lain-lain. “Kita ingin Indonesia melalui pemudanya bisa bangkit. Pemberdayaan pemuda dan pemberdayaan ekonomi syariah jadi tren global. Bahkan, di semua bank konvensional kita semua menggunakan *Islamic payment*,” papar Tatan. ■ mh/sf

# Meutya Hafid Pimpin Komisi I



Ketua DPR RI Puan Maharani berfoto bersama saat penetapan Pimpinan Komisi I DPR RI. Foto: Naefuroji/HR

**L**ima pimpinan Komisi I DPR RI resmi dilantik. Mereka adalah Meutya Viada Hafid dari Fraksi Partai Golkar sebagai Ketua Komisi dan empat orang Wakil Ketua, yakni Utut Adianto (F-PDI Perjuangan), Bambang Kristiono (F-Gerindra), Teuku Riefky Harsya (F-Demokrat), dan Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS).

Pelantikan berlangsung tanpa dinamika dan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dengan Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI Korekku Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rachmat Gobel di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10).

“Kami bersyukur hari ini sudah bisa disahkan. Komisi I menjadi

Komisi pertama yang diresmikan,” tutur Meutya. Ia mengatakan sebagai langkah pertama usai penetapan Pimpinan dan Anggota, Komisi I DPR RI akan segera mengundang Kementerian beserta Lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informatika untuk membicarakan program kerja ke depan.

“Melihat banyak Menteri baru di Kementerian yang bermitra dengan Komisi I, dalam waktu dekat kita akan coba panggil untuk mengetahui program-program, strategi dan rencana strategis mereka ke depan,” papar Meutya, sembari mengatakan ada banyak PR yang belum terselesaikan oleh Komisi I DPR RI di periode sebelumnya. Karenanya, ia berharap target-target yang telah

ditetapkan dapat tercapai di bawah kepemimpinannya.

Salah satunya di bidang pertahanan, Komisi I DPR RI berkomitmen untuk fokus mempercepat pembangunan kekuatan pokok minimum atau *Minimum Essential Force* (MEF). Menurutnya, upaya tersebut penting untuk membentuk kekuatan pertahanan yang mumpuni, terutama modernisasi alutsista.

“Industri pertahanan nasional itu menjadi salah satu yang kita dorong agar lebih dapat berkembang, harapannya kita lebih bisa mandiri dalam hal alutsista dengan mengedepankan pertahanan nasional,” harap politisi dapil Sumatera Utara I ini yang juga bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI pada Periode 2014-2019 lalu. ■ ann/sf

# Pimpinan Komisi II Ditetapkan

**K**omposisi susunan pimpinan Komisi II DPR RI telah ditetapkan. Dalam rapat penetapan pimpinan Komisi II yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Azis Syamsuddin disepakati 5 orang Pimpinan Komisi II DPR RI yang terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua .

Anggota DPR RI Fraksi Golongan Karya Ahmad Doli Kurnia Tandjung terpilih sebagai Ketua Komisi II DPR RI. Adapun empat orang Wakil Ketua yang disepakati untuk mendampingi sebagai Pimpinan Komisi II adalah Arif Wibowo (F-PDI Perjuangan), Saan Mustofa (F-NasDem), Yaqut Cholil Qoumas (F-PKB), dan Mohammad

Arwani Thomafi (F-PPP).

Dalam kesempatan rapat penetapan yang dilaksanakan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10) itu, Azis menyerahkan palu sidang secara simbolis kepada 5 Pimpinan Komisi II DPR RI yang terpilih.

Ketua Komisi II DPR RI terpilih Ahmad Doli Kurnia Tandjung usai pelantikan, menyampaikan bahwa setelah rapat penetapan, Pimpinan Komisi II DPR RI akan melakukan Rapat Pimpinan untuk menyusun agenda kerja Komisi II DPR RI.

“Nanti kita akan berkumpul kembali untuk bisa kita bahas bersama hasil pembahasan yang dilakukan dalam

”

**BANYAK HAL YANG AKAN  
DIBAHAS, SALAH SATUNYA  
MENGENAI UNDANG-  
UNDANG PERTANAHAN  
YANG KEMARIN SEMPAT  
TERTUNDA**

rapat pimpinan. Dan itu semua menyangkut agenda kerja kita sampai masa sidang berakhir yakni pada bulan Desember menjelang masa reses,” kata legislator dapil Sumatera Utara III itu.

Ditambahkan Doli, banyak hal yang akan dibahas, salah satunya mengenai Undang-Undang Pertanahan yang kemarin sempat tertunda dan di-*carry over* kepada DPR RI periode ini. “Selain itu juga evaluasi tentang Pemilu 2019 dan persiapan Pilkada Tahun 2020, di samping ada isu-isu lain yang berkembang,” ucap Doli. ■ dep/es



Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Azis Syamsuddin menyerahkan palu sidang kepada Pimpinan Komisi II DPR RI. Foto: Runi/HR



Ketua DPR RI Puan Maharani dan Pimpinan DPR RI lainnya saat penetapan Pimpinan Komisi III DPR RI. Foto: Gerald/HR

# Ketua DPR Tetapkan Pimpinan Komisi III

**K**etua DPR RI Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmat Gobel menetapkan susunan komposisi Pimpinan Komisi III DPR RI. Dalam rapat pengesahan Puan membacakan susunan Ketua dan Wakil Ketua Komisi III yang akan ditetapkan.

Mereka adalah Herman Herry dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai ketua, selanjutnya Wakil Ketua adalah Adies Kadir dari Fraksi Golkar, Desmond J Mahesa dari Fraksi Gerindra, Ahmad Syahrani dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem), dan Mulfachri Harahap dari Fraksi PAN. Penetapan digelar di ruang rapat Komisi III DPR RI, Nusantara II,

”

**IA BERHARAP AGAR PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI III DAPAT BEKERJA CEPAT MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT**

Senayan, Jakarta, Selasa (29/10).

Selanjutnya, Puan meminta persetujuan Anggota Komisi III DPR RI yang hadir untuk menetapkan nama-nama pimpinan. “Apakah nama-nama calon Pimpinan Komisi III DPR RI yang kami sampaikan dapat disetujui dan ditetapkan sebagai Pimpinan Komisi

III?” tanya Puan, persetujuan para Anggota Komisi III DPR RI dan ketukan palu sidang menjadi tanda Pengesahan Pimpinan Komisi III DPR RI.

Sama seperti periode sebelumnya, Komisi III DPR RI tetap membidangi urusan hukum, HAM, dan keamanan. Puan memberikan ucapan selamat kepada Pimpinan Komisi III DPR RI yang baru ditetapkan. Ia berharap agar Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI dapat bekerja cepat memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Khususnya kepada Pimpinan Komisi III DPR RI dalam melaksanakan tugas bangsa dan negara serta memperjuangkan aspirasi rakyat dan mungkin Komisi III ini yang akan bekerja paling cepat mulai hari ini untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang harus diselesaikan dalam waktu singkat,” ucapnya. Agenda penetapan dilanjutkan dengan penyerahan palu sidang dari Puan kepada Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry beserta para wakilnya. ■ eko/es



# Pimpinan DPR Lantik Sudin Jabat Ketua Komisi IV



Wakil Ketua DPR Korinbang Rachmat Gobel berfoto bersama usai penetapan Pimpinan Komisi IV DPR RI. Foto: Andri/HR

**W**akil Ketua DPR RI Koordinator bidang Industri dan Pembangunan

(Korinbang) Rachmat Gobel melantik Pimpinan Komisi IV DPR RI berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan fraksi-fraksi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu, (30/10).

“Berdasarkan usulan Fraksi dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus, izinkan kami Pimpinan DPR RI membacakan calon Pimpinan Komisi IV yakni Ketua dari Fraksi PDI Perjuangan Sudin dan Wakil Ketua yakni Dedi Mulyadi dari Fraksi Golkar, Budisatrio

”

**AGAR KOMISI IV DPR RI  
DAPAT MENJALANKAN  
TUGAS-TUGASNYA  
DENGAN BAIK DEMI  
BANGSA DAN NEGARA**

Djiwandodo dari Fraksi Gerindra, Hasan Aminuddin dari Fraksi NasDem dan Daniel Johan dari PKB,” papar Gobel.

Seluruh hadirin peserta rapat Komisi IV DPR RI pun memberikan persetujuannya terhadap nama pimpinan tersebut. “Apakah nama calon

Pimpinan Komisi IV ini dapat disetujui sebagai pimpinan Komisi IV?” tanya Gobel. “Setuju,” jawab hadirin rapat. Gobel pun berpesan agar Komisi IV DPR RI dapat segera bekerja dalam menjalankan tugas pokok DPR RI yakni bidang legislasi, anggaran dan pengawasan.

Gobel pun mengucapkan selamat kepada legislator yang dipercaya menjadi pimpinan Komisi IV DPR RI, ia turut mendoakan agar Komisi IV DPR RI dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik demi bangsa dan negara. Usai dilakukan pelantikan pimpinan, Komisi IV DPR RI langsung melakukan rapat internal guna membahas isu-isu strategis. ■ hs/es

# Lasarus Pimpin Komisi V Periode 2019-2024

**R**apat konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI pada tanggal 18 Oktober 2019 lalu salah satunya menyepakati komposisi Fraksi-Fraksi pada Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang diputuskan secara musyawarah mufakat. Berdasarkan Undang-Undang MD3, Pimpinan Komisi dan Badan terdiri dari 1 orang Ketua dan paling banyak 4 Wakil Ketua.

Untuk itu, Komisi V DPR RI menggelar Rapat Penetapan Pimpinan di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel. "Saya mempersilahkan juru bicara masing-masing Fraksi menyampaikan calon Pimpinan Komisi V DPR RI," ujar Gobel saat memimpin rapat.

Menindaklanjuti hal itu, Fraksi PDI-Perjuangan mengawali dengan mengusulkan satu nama, yaitu Lasarus. Disusul, Fraksi Partai Golkar (F-PG) mengusulkan nama Ridwan Bae. Sementara itu, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) merekomendasikan nama Ahmad Riza Patria, Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem) Syarif Abdullah Alkadrie, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mengusulkan nama Nurhayati.

Berdasarkan usulan Fraksi-Fraksi tersebut, Gobel meminta izin untuk mengumumkan nama-nama calon Pimpinan Komisi V DPR RI. Pimpinan tersebut yaitu Lasarus sebagai Ketua Komisi V DPR RI, dan empat Wakil Ketua Komisi V DPR RI yakni Ridwan Bae, Ahmad Riza Patria, Syarif Abdullah,



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel berfoto bersama Pimpinan Komisi V DPR RI. Foto: Andri/HR

dan Nurhayati. "Apakah nama calon Pimpinan Komisi V DPR RI yang kami sampaikan dapat disetujui dan ditetapkan menjadi calon Pimpinan Komisi V DPR RI?" tanya Gobel.

Pertanyaan itu pun dijawab secara serempak 'Setuju' oleh seluruh Anggota Komisi V DPR RI yang hadir pada rapat tersebut. Dengan telah selesainya penetapan Pimpinan Komisi V DPR RI, tutur Gobel, maka selesailah tugasnya memimpin rapat dalam rangka pemilihan dan penetapan Pimpinan Komisi V DPR RI.

"Atas nama pribadi dan Pimpinan Dewan kami mengucapkan selamat untuk saudara-saudara yang telah diberikan kepercayaan untuk menjadi Pimpinan Komisi V DPR RI. Semoga

Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan bimbingan pada kita semua khususnya Pimpinan Komisi V DPR RI dalam melaksanakan tugas bangsa dan negara dalam memperjuangkan aspirasi rakyat," pesan Gobel.

Selanjutnya, Gobel mempersilahkan kepada semua Pimpinan Komisi V DPR RI yaitu Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, dan empat Wakil Ketua yakni Ridwan Bae, Ahmad Riza Patria, Syarif Abdullah, dan Nurhayati untuk menempati kursi Pimpinan Komisi V DPR RI. Rapat ini ditutup dengan penyerahan palu sidang kepada Ketua Komisi V DPR RI Lasarus sebagai simbolis penetapan Pimpinan Komisi V DPR RI Periode 2019-2024.

■ pun/sf

# Pimpinan Komisi VI Disahkan



Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rachmat Gobel menyerahkan palu sidang kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI. Foto: Andri/HR

**K**omisi VI DPR RI telah menetapkan paket Pimpinan yang akan bekerja memimpin Komisi lima tahun ke depan dalam rapat internal di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10). Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rachmat Gobel saat memimpin rapat meminta perwakilan dari tiap Fraksi terpilih untuk menyebutkan nama Pimpinan mereka, hingga terpilih paket Pimpinan tersebut.

Paket Pimpinan Komisi VI DPR RI yang diajukan terdiri dari Faisol Riza (F-PKB) sebagai Ketua Komisi, dan empat Wakil Ketua Komisi yakni Aria Bima (F-PDI Perjuangan), Gde Sumarjaya Linggih (F-PG), Mohamad Hekal (F-Gerindra), dan

Martin Manurung (F-NasDem). Gobel berharap kepada para Pimpinan Komisi VI DPR RI terpilih untuk dapat segera melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada mitra juga kepada rakyat.

“Atas nama pimpinan Dewan, saya mengucapkan selamat bertugas kepada para saudara yang telah dipercaya untuk menjadi pimpinan di Komisi VI DPR RI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat memberikan petunjuk dan ikhtiar bagi kita semua khususnya kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI dalam melaksanakan tugas bangsa dan negara serta memperjuangkan aspirasi rakyat,” pesan Gobel se usai mengetuk palu tanda pengesahan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI terpilih Gde Sumarjaya

Linggih usai pelantikan mengaku antusias untuk bekerja bersama para rekan barunya di Komisi VI DPR RI. Gde Sumarjaya yang pada periode sebelumnya juga menjabat sebagai Anggota di Komisi VI DPR RI ini melihat prosesi perkenalan yang dilakukan sebelum rapat juga berlangsung hangat serta terlihat menyenangkan.

“Hari ini saya cukup gembira, karena melihat teman-teman yang baru berkenalan cukup akrab dan kelihatannya mereka sangat antusias untuk bersama melakukan kerja sama dalam Komisi kita ini. Hal ini tentu menggembirakan bagi kami sebagai Pimpinan Komisi VI. Jadi kami tidak perlu repot-repot menciptakan suasana kondusif, karena teman-teman anggota telah menunjukkannya,” imbuhnya. ■ er/sf

# Sugeng Suparwoto Ditetapkan Sebagai Ketua Komisi VII

**W**akil Ketua DPR RI Kordinator bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel secara resmi menetapkan Sugeng Suparwoto dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) sebagai Ketua Komisi VII DPR RI. Serta empat orang Wakil Ketua yang terdiri dari Bambang Wuryanto dari Fraksi PDI Perjuangan, Alex Noerdin dari Fraksi Partai Golkar, Gus Irawan Pasaribu dari Fraksi Partai

Gerindra, dan Eddy Soeparno dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengatakan, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR RI, DPD RI, DPRD (MD3) pasal 427 E, dimana Pimpinan Komisi, dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terdiri atas 1 Ketua dan paling banyak 4 Wakil Ketua. Berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan

proporsional, menurut perimbangan jumlah anggota masing-masing fraksi.

“Sesuai rapat konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 18 oktober 2019 dimana salah satunya menyepakati komposisi Fraksi-Frakasi pada Pimpinan AKD yang telah diputuskan secara musyawarah dan mufakat, untuk itu kami meminta nama-nama calon dari fraksi masing-masing,” ujar Rahmat, saat memimpin rapat di Komisi VII DPR RI di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).

Usai masing-masing Fraksi menyampaikan usulan nama-nama calon Pimpinan Komisi yang membidangi energi dan sumber daya alam tersebut, Pimpinan rapat meminta persetujuan dari seluruh anggota Komisi VII DPR RI yang hadir.

Jawaban “setuju” dari seluruh anggota Komisi VII menjadi sinyal bagi Wakil Ketua DPR RI untuk segera menetapkan dan memberikan palu sidang kepada Ketua Komisi VII DPR RI terpilih, Sugeng Suparwoto dari Fraksi Partai NasDem dapil Jawa tengah VIII yang meliputi Cilacap dan Banyumas.

Terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang baru saja ditetapkan, Gobel berharap agar Pimpinan Komisi VII bisa bekerja secara maksimal. Pasalnya kekayaan dan sumber daya alam, serta hasil bumi Indonesia sangat banyak, sehingga diharapkan bisa memberi nilai tambah dan manfaat yang besar bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

“Selain itu saya berharap semoga semua bisa segera bekerja, bersinergi termasuk dengan pemerintah, agar bisa mewujudkan harapan masyarakat secara luas,” pungkasnya. ■ ayu/es



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel memberikan palu sidang kepada Pimpinan Komisi VII DPR RI. Foto: Andri/HR



Anggota DPR RI Yandri Susanto ditetapkan sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI oleh Wakil Ketua DPR RI Korkesra Muhaimin Iskandar. Foto: Jaka/HR

## Tugas Berat Menanti Pimpinan Komisi VIII

**W**akil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar menetapkan Pimpinan Komisi VIII DPR RI. Pimpinan Komisi VIII DPR RI terdiri dari satu Ketua dan empat Wakil Ketua. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto ditetapkan sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI.

Selain Yandri, Pimpinan DPR RI juga menetapkan empat Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, yakni Ihsan Yunus dari Fraksi PDI-Perjuangan, TB Ace Hasan Syadzily dari Fraksi Partai

Golkar, Moekhlas Sidik dari Fraksi Partai Gerindra, dan Marwan Dasopang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Para Anggota yang terhormat, dari nama-nama itu saya minta persetujuan pada Anggota Komisi VIII, apakah susunan Pimpinan Komisi VIII tersebut bisa disetujui,” tanya Muhaimin yang dijawab serempak dengan pernyataan “Setuju,” dari seluruh Anggota yang hadir pada rapat internal di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).

Sebelum resmi menyerahkan ‘palu sidang’ untuk diambil alih oleh Pimpinan Komisi VIII DPR RI yang baru,

Muhaimin mengucapkan selamat seraya mengingatkan mengenai tugas-tugas berat yang harus dilaksanakan di Komisi VIII DPR RI. Dirinya mengatakan salah satunya adalah penyelesaian Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU P-KS).

“Selamat menjalankan tugas-tugas berat di Komisi VIII. Yang harus dilaksanakan, yang paling berat, Undang-Undang P-KS. Undang-Undang Pesantren kemarin sudah selesai, itu prestasi Komisi VIII tahun ini,” pungkas politisi F-PKB itu.

Sebagai informasi, Komisi VIII DPR RI menjalankan tupoksi bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana. Sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah yang akan menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR RI, diantaranya Kemenag, Kemensos, Kementerian PPPA, BNPB, BPKH, KPAI, Baznas, dan BWI. ■ alw/sf

# Pimpinan Komisi IX Ditetapkan

**W**akil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra)

Muhaimin Iskandar melantik sejumlah Anggota DPR RI yang ditunjuk menjadi Pimpinan di Komisi IX DPR RI berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi.

“Sesuai Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus salah satunya menyepakati komposisi Fraksi-Fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Rapat yang diikuti 9 fraksi itu mengusulkan calon Pimpinan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) salah

satunya pimpinan di Komisi IX DPR yang akan kita sepakati hari ini,” ungkap Muhaimin saat memimpin rapat di Ruang Kerja Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).

Berdasarkan usulan Fraksi dalam rapat Bamus 18 Oktober lalu, lanjut Muhaimin, Ketua Komisi IX DPR RI yang disepakati ialah Felly Estelita Runtuwene dari Fraksi Partai NasDem. Diikuti Wakil Ketua Komisi IX yaitu Sri Rahayu dari F-PDI Perjuangan, Melki Laka Lena dari F- Partai Golongan Karya, Ansory Siregar dari F-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nihayatul Wafiroh dari F-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Sesuai dengan ketentuan UU nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU 17 tahun 2014 tentang MD3, Pasal 427 e ayat 1 menyatakan pimpinan Komisi, Baleg, Banggar, Bamus dan BURT di DPR terdiri dari satu Ketua dan didampingi oleh empat Wakil Ketua.

Sehingga komposisi pimpinan di Komisi IX ialah, Ketua Komisi IX Felly Estelita dan Wakilnya ialah Sri Rahayu, Melki Laka Lena, Ansory Siregar, dan Nihayatul Wafiroh. Apakah dapat disetujui?” tanya Muhaimin dan dijawab ‘Setuju’ oleh seluruh Anggota Komisi IX DPR RI.

Usai menerima palu sidang sebagai simbol pengukuhan sebagai Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene langsung memimpin rapat internal untuk membahas jadwal rapat di Komisi IX DPR RI yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan serta Jaminan Sosial.

■ rnm/es



Wakil Ketua DPR RI Korkesra Muhaimin Iskandar menetapkan Felly Estelita Runtuwene (F-NasDem) sebagai Ketua Komisi IX DPR RI. Foto: Jaka/HR

# Syaiful Huda Pimpin Komisi X



Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menetapkan Syaiful Huda (F-PKB) sebagai Ketua Komisi X DPR RI. Foto: Jaka/HR

**A**nggota DPR RI Syaiful Huda (F-PKB) akhirnya ditetapkan sebagai Ketua Komisi X DPR RI. Komisi ini kelak bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, dan kementerian serta lembaga lainnya yang bermitra dengan Komisi X DPR RI. Syaiful memimpin Komisi X DPR RI bersama empat wakilnya setelah dilantik oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.

Dalam pelantikan Pimpinan Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10) itu, hadir para anggota Komisi X DPR RI lainnya dari sembilan fraksi. Syaiful sendiri berasal dari daerah pemilihan (dapil) Jabar VII. Sementara

mendampingi Syaiful ada empat wakilnya, yaitu Hetifah Sjaifudian (F-PG), Dede Yusuf Macan Effendi (F-PD), Agustina Wilujeng (F-PDI Perjuangan), dan Abdul Fikri Faqih (F-PKS).

Nama-nama lama (petahana) masih mendominasi Pimpinan dan Anggota Komisi Pendidikan ini. Hetifah dan Fikri pada periode sebelumnya adalah Pimpinan Komisi X DPR RI. Dede Yusuf sebelumnya adalah Ketua Komisi IX DPR RI dan Agustina adalah Anggota Komisi IV DPR RI pada periode sebelumnya.

Muhaimin usai pelantikan mengatakan, “Komisi X nanti akan berhadapan dengan Menteri yang menantang dan menarik seperti Pak Nadim Makariem (Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan) yang (berusia) 35 tahun. Mungkin karena kreatifitasnya ia ditunjuk menjadi menteri,” analisa Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.

Muhaimin juga menyebut Wishnutama yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Para insan kreatif kini menjadi pejabat negara yang bermitra dengan Komisi X DPR RI. “Selamat kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi X. Semoga tugas kita lancar sampai lima tahun yang akan datang,” ucapnya menutup pelantikan tersebut. Sementara Syaiful langsung memimpin rapat perdana dengan memperkenalkan para Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI Periode 2019-2024. ■ mh/sf

# Pimpinan Komisi XI Disepakati Secara Aklamasi



Wakil Ketua DPR RI Korekku Sufmi Dasco Ahmad menetapkan Dito Ganinduto (F-Golkar) sebagai Ketua Komisi XI DPR RI. Foto: Azka/HR

**W**akil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku)

Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat penetapan Pimpinan Komisi XI DPR RI. Usulan nama calon diajukan oleh 9 Fraksi untuk 1 kursi Ketua dan 4 kursi Wakil Ketua. Fraksi Partai Golkar mengusulkan Dito Ganinduto sebagai Ketua Komisi XI DPR RI.

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 246, menyatakan bahwa setiap rapat DPR itu bersifat terbuka kecuali yang disepakati tertutup. Karena pada hari ini hanya penetapan pimpinan, saya

usulkan dan kita nyatakan rapat ini terbuka,” kata Dasco di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10).

Selanjutnya, untuk empat kursi Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fraksi PDI-Perjuangan mengusulkan Eriko Sotarduga, Fraksi Partai NasDem mengajukan Achmad Hatari, Fraksi PKB mengusulkan nama Fathan Subchi, dan terakhir, Fraksi PPP mengusulkan Amir Uskara.

“Berdasarkan usulan-usulan Fraksi tersebut, dengan ini saya tetapkan Pimpinan Komisi XI. Apakah nama-nama calon tersebut dapat ditetapkan

menjadi Pimpinan Komisi XI DPR RI,” tanya Dasco, dengan diikuti dengan jawaban “Setuju” dari seluruh Anggota Komisi XI DPR RI yang hadir.

Dengan ditetapkannya nama-nama pimpinan Komisi XI DPR RI tersebut, Dasco mengakhiri rapat dengan ucapan ‘Selamat bertugas’, dan selanjutnya mempersilakan Pimpinan terpilih untuk menempati kursi pimpinan dan menerima penyerahan palu sidang. “Kepada Pimpinan saya persilakan ke depan dan menerima palu sidang,” tutup politisi Partai Gerindra tersebut dan diakhiri dengan foto bersama.

■ alw/sf



# Pimpinan Baleg Ditetapkan, Siap Bahas ‘Omnibus Law’

**W**akil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menetapkan Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Dalam penetapan itu, Supratman Andi Agtas (F-Gerindra) terpilih menjadi Ketua Baleg dan diresmikan bersama empat Wakil Ketua, yakni Rieke Diah Pitaloka (F-PDI Perjuangan), Willy Aditya (F-NasDem), Ibnu Multazam (F-PKB), dan Achmad Baidowi (F-PPP).

“Apakah nama-nama tersebut bisa disepakati?” tanya Azis kepada seluruh Anggota Baleg yang hadir di Ruang Rapat Baleg di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10). Setelah mendapatkan persetujuan, secara simbolis Azis menyerahkan palu sidang kepada pimpinan yang baru.

Kepada Pimpinan Baleg terpilih, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu menyampaikan harapannya agar Baleg dapat menjadi *partner* Pemerintah dan Komisi teknis terkait dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai kinerjanya.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan Baleg akan segera mengundang Pemerintah untuk membahas *omnibus law*, seperti yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya beberapa waktu lalu. Dua *omnibus law* yang disebut Presiden Jokowi akan dirancang adalah UU Cipta Lapangan Kerja serta UU Pemberdayaan UMKM.

“Dalam waktu dekat ini kami akan meminta untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beserta dengan Menkopolkam, Menkumham, mungkin juga dengan Menko Perekonomian untuk

membahas *omnibus law*,” papar Ketua Baleg DPR RI Periode 2014-2019 itu.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat Baleg juga akan segera memulai pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) selama 5 tahun ke depan bersama Pemerintah. Menurutnya, Baleg akan segera menyurati Komisi-Komisi di AKD untuk meminta daftar RUU yang akan diajukan dalam Prolegnas jangka panjang dan menengah.

Terkait Prolegnas, ia juga tak menutup kemungkinan akan ada lanjutan pembahasan sejumlah RUU *carry over* dari DPR RI Periode sebelumnya, jika memang disetujui bersama oleh DPR

bersama Pemerintah. Supratman menargetkan, penyusunan Prolegnas akan selesai sebelum memasuki masa reses.

“Targetnya, kita tidak akan buat UU terlalu banyak masuk di Prolegnas, apalagi kalau ada *carry over*. Sementara, *carry over* bisa disepakati sekali lagi, bukan hanya di Baleg, tetapi bersama Pemerintah. Pertimbangannya, yang bisa di-*carry over* adalah RUU yang sudah hampir rampung atau materinya sudah hampir disepakati. Namun, sekali lagi ini tergantung, kalau usulannya dari DPR, maka tergantung kepada komisi yang membahas RUU bersangkutan,” jelas Supratman. ■ ann/sf



Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menetapkan Pimpinan Baleg DPR RI. Foto: Arief/HR

# DPR Tetapkan Lima Pimpinan Banggar

**P**impinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah ditetapkan. Rapat penetapan Pimpinan Banggar yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menetapkan lima orang Pimpinan Banggar yang terdiri dari 1 orang Ketua dan 4 orang Wakil Ketua.

“Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 Pasal 427E ayat 1B, Pimpinan Komisi, Baleg, Banggar, BKSAP, MKD dan BURT terdiri dari 1 orang Ketua dan paling banyak 4 orang Wakil Ketua yang ditetapkan dari dan oleh anggota Komisi, Baleg, Banggar, BKSAP, MKD dan BURT berdasarkan prinsip

musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota setiap Fraksi,” ucap Dasco di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).

Dikatakannya, sesuai dengan Rapat Konsultasi Pengganti Bamus tanggal 18 Oktober 2019 salah satunya menyepakati komposisi fraksi-fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang telah diputuskan secara musyawarah untuk mufakat. Usai mempersilakan kepada juru bicara fraksi-fraksi menyampaikan nama calon pimpinan Badan Anggaran DPR RI, Dasco kemudian mengumumkan nama-nama Pimpinan Banggar sesuai usulan fraksi-fraksi tersebut.

“Selaku Pimpinan Rapat, saya

mengumumkan calon Pimpinan Banggar DPR RI yaitu Ketua M. Said Abdullah (F-PDI Perjuangan), Wakil Ketua Muhidin Mohamad Said (F-Golkar), Rusdi Mase Mapasesu (F-NasDem), Cucun Ahmad Syamsurijal (F-PKB), dan Edhie Baskoro Yudhoyono (F-Demokrat). Apakah nama calon Pimpinan Badan Anggaran yang telah kami sebutkan dapat disetujui dan ditetapkan sebagai Pimpinan Banggar DPR RI?,” tanya Dasco, sontak seluruh Anggota Banggar yang hadir menjawab setuju.

Dalam kesempatan tersebut, para Pimpinan Banggar yang baru ditetapkan dipersilakan untuk menempati kursi pimpinan dan menerima palu sidang. Pada sambutannya, Ketua Banggar terpilih M. Said Abdullah berharap agar seluruh Anggota Banggar bersatu dan tidak terkotak-kotak oleh fraksi serta kepentingan yang lain. “Badan Anggaran memang khusus untuk mengawal tentang jalannya pemerintahan, khususnya dibidang perekonomian,” ujar Said Abdullah.

■ dep/es



Wakil Ketua DPR RI Korekku Sufmi Dasco Ahmad menetapkan M. Said Abdullah (F-PDI Perjuangan) sebagai Ketua Banggar DPR RI. Foto: Azka/HR



Wakil Ketua DPR RI Korkesra Muhaimin Iskandar menetapkan Agung Budi Santoso (F-Demokrat) sebagai Ketua BURT. Foto: Gerald/HR

## Lima Pimpinan BURT Ditetapkan

**P**impinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Periode 2019-2024 resmi ditetapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar. Melalui rapat internal BURT, disepakati lima orang Pimpinan BURT yang terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua.

“Sesuai Pasal 427E (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3), Pimpinan terdiri dari 1 orang Ketua dan 4 Wakil Ketua. Kemudian kita juga telah menyetujui komposisi Pimpinan BURT sesuai dengan hasil rapat pengganti Bamus,” kata Muhaimin di Ruang Rapat BURT, Gedung Nusantara II, Senayan,

Jakarta, (30/10).

Berdasarkan kesepakatan dan keputusan itulah, lanjut Muhaimin, Fraksi Partai Demokrat mengajukan Agung Budi Santoso sebagai Ketua. Sementara untuk Wakil Ketua, Fraksi PDI-Perjuangan mengajukan Evita Nursanty, Fraksi Gerindra mengusulkan Novita Wijayanti, Fraksi PKS mengajukan Achmad Dimiyati Natakusumah, dan Fraksi PAN mengusulkan A. Bakri HM.

“Nama-nama Pimpinan BURT tersebut apakah bisa disetujui,” tanya Politisi F-PKB itu, yang langsung dijawab “Setuju,” oleh seluruh Anggota BURT yang hadir, dan kemudian ditutup oleh tiga kali ketukan ‘palu sidang’. Menutupi proses pelantikan, secara simbolis

dilakukan penyerahan palu sidang dari Muhaimin kepada Pimpinan BURT Periode 2019-2024 yang baru.

Sebagai informasi, BURT bertugas menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR RI, melakukan pengawasan terhadap Sekjen dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran, melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan MPR berkaitan dengan kerumahtanggaan berdasarkan hasil rapat Bamus, menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan BURT kepada anggota, hingga menyampaikan laporan kinerja dalam Rapat Paripurna. ■ atw/sf

# Marwan Cik Asan Ditetapkan Jadi Ketua BAKN



Wakil Ketua DPR RI Korekku Sufmi Dasco Ahmad menetapkan Anggota DPR RI Marwan Cik Asan sebagai Ketua BAKN. Foto: Ojje/HR

**W**akil Ketua DPR RI Koordinator bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku)

Sufmi Dasco Ahmad melantik sejumlah Anggota DPR RI yang ditunjuk menjadi Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi.

“Sesuai Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus salah satunya menyepakati komposisi Fraksi-Fraksi pada BAKN yang diikuti 9 fraksi dengan usulan calon Pimpinan BAKN. Berdasarkan usulan Fraksi tersebut,

Pimpinan BAKN yakni Marwan Cik Asan selaku Ketua BAKN dari Fraksi Partai Demokrat dan diisi dua wakil ketua yaitu Hendrawan Supratikno dari Fraksi PDIP dan Ahmad Syaikh dari Fraksi PKS,” ujar Dasco di Ruang Rapat BAKN DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10)

Persetujuan pun diperoleh oleh seluruh Anggota BAKN, dan diharapkan BAKN dapat segera bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga kredibilitas keuangan negara. “Apakah nama Pimpinan BAKN ini dapat disetujui dan ditetapkan sebagai pimpinan BAKN DPR?” tanya Dasco. “Setuju,” jawab seluruh hadirin.

Usai melantik Pimpinan BAKN, Dasco

berpesan agar BAKN dapat bekerja pada hari ini, karena tantangan dan ancaman ekonomi ke depan semakin nyata. Sehingga keberadaannya pun sangat diperlukan guna meminimalisir dampak negatif dari ancaman ekonomi global tersebut.

“BAKN sudah ada. Dengan ditetapkannya Pimpinan BAKN ini diharapkan agar dapat efektif bekerja pada hari ini. Tidak usah menunggu lama, karena agenda semakin ketat di depan. Apalagi, kemudian ada ancaman ekonomi global dan juga diharapkan supaya tidak berdampak pada Indonesia. BAKN juga diharapkan dapat lebih mengefektifkan tugas-tugasnya,” pesan Dasco. ■ hs/es

# DPR Sahkan Pimpinan MKD

**W**akil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar secara resmi mengesahkan Habib Aboe Bakar Alhabsyi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Disertai juga dengan empat Wakil Ketua MKD yang terdiri dari Trimedya Pandjaitan (F-PDI Perjuangan), Andi Rio Idris Pandjalangi (F-Golkar), Habiburokhman (F-Gerindra), dan Saleh Partaonan Daulay (F-PAN).

Pengesahan ini ditandai dengan diberikannya palu sidang oleh Wakil Ketua Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) tersebut kepada Ketua MKD terpilih

Aboe Bakar Alhabsyi didampingi pimpinan terpilih lainnya. Agenda pelantikan ini dilangsungkan di ruang rapat MKD, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).

“Sesuai dengan konsultasi rapat pengganti Bamus 18 Oktober 2019, kesepakatan khusus MKD adalah Ketua dari Fraksi PKS, Wakil Ketua dari Fraksi PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional. Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Bamus tersebut apakah bisa disetujui?” tanya Muhaimin dan serentak dijawab ‘setuju’ oleh seluruh Anggota MKD yang hadir.

Seusai meminta persetujuan, politisi yang akrab disapa Cak Imin tersebut berpesan agar MKD dapat bekerja

secepatnya menyusun strategi kerja guna mengarungi Periode 2019-2024. Selain itu, menurutnya MKD sebagai badan yang bersifat tetap di kedewanan, harus bisa menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

“Mahkamah ini kan memiliki fungsi untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Demi mewujudkan fungsi tersebut, MKD harus cepat buat strategi kerja. Harus segera bergerak lakukan sosialisasi dan lakukan komunikasi dengan mitra,” pesan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. ■ *er/sf*



Wakil Ketua DPR RI Korkesra Muhaimin Iskandar menetapkan Aboe Bakar Al Habsy (F-PKS) sebagai Ketua MKD DPR RI. Foto: Jaka/HR

# Pimpinan DPR Apresiasi Budaya Silaturahmi Pengurus Koordinatoriat Wartawan

**W**akil Ketua DPR RI Koordinator bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku)

Sufmi Dasco Ahmad menilai peran wartawan sangat penting dalam membantu tugas DPR RI. Hal tersebut diungkapkannya usai bersilaturahmi dengan Pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen di ruang kerjanya di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (28/10).

“Peran wartawan menurut saya penting, terutama dalam membantu menyuarakan aspirasi rakyat kepada DPR RI. Serta ikut menyebarkan berbagai usaha dan perjuangan yang selama ini telah dilakukan DPR RI untuk

mewujudkan aspirasi rakyat. Secara tidak langsung, wartawan juga ikut membantu tugas-tugas DPR RI sebagai wakil rakyat,” ujar Dasco.

Oleh karena itu, lanjutnya, hubungan baik antara DPR RI dengan wartawan (terutama pimpinan) harus terus terjaga. Ia juga menyambut positif budaya silaturahmi yang dijalankan oleh Pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen terhadap pimpinan baru DPR RI. Meskipun secara pribadi, selama ini antara Pimpinan DPR RI dan wartawan sudah terjalin dengan baik.

Senada dengan Dasco, Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen, Romdoni Setiawan mengatakan

bahwa sejatinya secara pribadi hubungan masing-masing Pimpinan DPR RI dengan wartawan sudah terjalin dengan baik. Namun, sebagaimana sebuah kebiasaan yang sudah terjalin sejak lama, di mana pada setiap kepemimpinan baru di DPR RI, pengurus koordinatoriat menggelar silaturahmi sekaligus memperkenalkan diri kepada Pimpinan DPR RI.

Baik Dasco maupun Dony berharap ke depan hubungan antara DPR RI dengan wartawan dapat terus terjalin dengan lebih baik lagi, sehingga lebih jauh dapat bermanfaat tidak hanya bagi kedua belah pihak, namun juga untuk masyarakat luas. ■ ayu/es



Wakil Ketua DPR RI Korekku Sufmi Dasco Ahmad bersama Pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen. Foto: Andri/HR



Kepala Bagian Humas Setjen DPR RI Minarni (kedua dari kanan) menerima Anugerah Media Humas (AMH) 2019. Foto: Eko/HR

# Setjen DPR Raih Penghargaan Stan Terinformatif AMH 2019

**S**ekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI meraih penghargaan stan terinformatif di acara puncak penghargaan insan humas tanah air, Anugerah Media Humas (AMH) 2019. Acara tersebut berlangsung meriah sekaligus menjadi penutup dari rangkaian kegiatan Sinergi Aksi Informasi Komunikasi (SAIK) 2019 di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, Jumat (25/10) malam.

Pada pergelaran SAIK 2019, Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) DPR RI bekerjasama dengan beberapa unit kerja di Biro Pemberitaan Parlemen serta melibatkan Bidang Data Teknologi dan Informasi (BDTI)

sebagai pelaksana langsung kegiatan tersebut telah memberikan banyak inovasi dalam penyampaian informasi kepada para pelajar dan khalayak umum.

Kepala Bagian Humas DPR RI Minarni menyampaikan, penghargaan stan paling informatif yang diperoleh Setjen DPR RI ini akan menjadi penyemangat kerja para staf untuk melakukan inovasi-inovasi lain dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Alhamdulillah tahun 2019 ini kita mendapatkan penghargaan sebagai lembaga terinformatif, dengan harapan kita lebih bersemangat, dan lebih giat lagi, dalam menginformasikan lembaga DPR RI

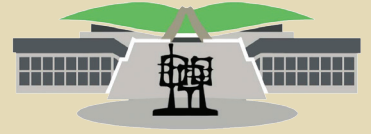
kepada masyarakat. Khusus tahun ini dengan tema kita adalah ‘Parlemen Baru Harapan Baru’,” papar Minarni.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI Widodo Muktiyo menyampaikan, AMH merupakan kegiatan tahunan yang sudah 14 kali diselenggarakan. Menurutnya, terdapat banyak kemajuan peserta AMH dari tahun-ketahun.

Penilaian AMH meliputi kategori Penerbitan Media Internal, Siaran Pers atau Pemberitaan, Media Sosial, dan kategori *Website*. Pada tahun ini, AMH diikuti oleh 169 instansi yang tersebar seluruh Indonesia yang meliputi Kementerian dan Lembaga, BUMN dan BUMD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota serta Perguruan Tinggi.

Adapun penilaian dari AMH sendiri yaitu dengan mengedepankan substansi, *packaging*, serta sebaran informasi dari media yang dikelola. Penilaian dilakukan secara profesional dari dewan juri yang berpengalaman di bidang pemberitaan dan kehumasan.

Selain DPR RI sebagai stan terinformatif, ajang AMH 2019 juga memberikan penghargaan beberapa kategori lainnya bagi instansi yang berpartisipasi pada SAIK 2019. ■ eko/es



Jajaran Komisi III DPR RI dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menyambangi rumah calon tunggal Kapolri Komjen Pol Idham Azis, di Jalan Panglima Polim III Nomor 7A, Jakarta Selatan, Rabu (30/10). Foto: Naefuroji/HR



Bagian Humas Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI turut serta dalam pameran Legal Expo 2019 dengan mengusung tema "DPR Baru, Harapan Baru" yang diadakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Plaza Semanggi, Jakarta, Kamis (24/10). Foto: Runi/HR



Penyematan Satya Lencana oleh Deputy Persidangan Setjen dan BK DPR RI Damayanti dan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono usai Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 dengan tema 'Bersatu Kita Maju', di Halaman Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10). Foto: Runi/HR

